



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 274/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 oleh Tim Evaluasi Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Setelah melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Bupati mengajukan permohonan nomor register peraturan daerah kepada Gubernur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Juli 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,


ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 274/KEP/HK/ 2025

TANGGAL : 30 Juli 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025-2029

A. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu, 2025 - 2029, 2030 - 2034, 2035 - 2039, dan 2040 - 2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2045, bahwa periodisasi RPJMD adalah Tahun 2025-2029.
2. Penyajian sistematika RPJMD sampai dengan penetapan RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	Rancangan PERDA RPJMD	HASIL EVALUASI
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029	Diktum Mengingat: Angka 4: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);	Diktum Mengingat Angka 4 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

C. SUBSTANSI RANCANGAN AWAL RPJMD

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Subbab Dasar Hukum Penyusunan agar disempurnakan, diantaranya:

- a. Pada Subbab 1.1 Latar belakang perlu ditambahkan Pendekatan dan Tahapan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah yang disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
- b. Perlu diseleksi kembali, terkait peraturan perundangan yang memang diamanatkan dan perlu dimuat untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah khususnya perencanaan jangka menengah daerah, perlu untuk dicantumkan diantaranya:
  - Angka 6 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856)

- Angka 9 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- Angka 14 diubah menjadi : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

## 2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Secara umum penyajian Bab II telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain:

- a. Agar memastikan untuk memasukkan indikator wajib sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
- b. Pada Subbab 2.5 Gambaran Keuangan Daerah agar penyajian tabel disesuaikan dengan tabel pada lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yaitu : Tabel 3.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024, Tabel 3.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024, Tabel 3.2 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030.
- c. Pada Subbab 2.5 Gambaran Keuangan Daerah untuk dalam Tabel. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030, dalam penerimaan pembiayaan masih merencanakan Silpa dalam Pembiayaan.
- d. Pada Subbab 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis:
  - 1) Agar dipastikan penentuan permasalahan berangkat dari data capaian kinerja yang disajikan pada Bab II Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - 2) Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang disajikan pada subbab sebelumnya.
  - 3) Agar diperhatikan konsisten Permasalahan pembangunan Daerah yang antar subbab. Dalam penelaahan terhadap permasalahanan didapati ada 7 permasalahan Utama di Kabupaten Sumba Tengah sedangkan dalam Tabel 2.95 Keterkaitan Masalah Daerah, SDGs, Isu Strategis Nasional, Isu Provinsi NTT, Isu Strategis KLHS dan Isu Strategis Kabupaten Sumba Tengah, terdapat 14 Masalah Daerah.

- 4) Agar permasalahan dapat dilengkapi sesuai dengan arah pembangunan yang telah dikelompokkan ke dalam empat aspek pembangunan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
- 5) Agar dipastikan isu strategis daerah sudah memperhatikan permasalahan dan potensi daerah, sebagaimana perumusan isu strategis daerah pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Perlu dipetakan kembali terkait isu strategis daerah dalam hubungan dengan permasalahan pembangunan daerah.

### 3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Perlu Pemetaan keterkaitan Misi dengan Masalah dan Isu Strategis semua isu strategis sudah di jawab oleh Misi dalam RPJMD
- b. Agar menambahkan Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2030 disesuaikan dengan tabel 3.5 Inmendagri 2 tahun 2025.
- c. Untuk Indikator Tujuan dan Sasaran dipastikan sudah ada formula perhitungannya sehingga tidak menyulitkan saat evaluasi RPJMD
- d. Agar teknik menentukan program prioritas mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

### 4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

- a. Agar dipastikan program Perangkat Daerah yang tercantum pada RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan sigma seluruh program yang ada pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- b. Untuk Program Pengelolaan Pendidikan agar dapat menambahkan Indikator Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang melaksanakan layanan HI dengan baseline menggunakan raport Pendidikan sedangkan target 2030 adalah 100%
- c. Untuk menambahkan outcomes dan target kinerja *outcome* dari masing-masing program Perangkat Daerah yang terdaftar pada RPJMD.
- d. Agar Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang disajikan capaiannya pada Bab II menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Bab IV RPJMD sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang lain dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah atau dokumen rencana lainnya.
- e. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) disesuaikan dengan tabel 4.2 pada Inmendagri 2 tahun 2025.
- f. Untuk IKD agar dapat memasukkan semua indikator yang diminta oleh kementerian/lembaga
- g. Agar menambahkan tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan IKU Perangkat Daerah

I. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029. Masukan dari hasil Evaluasi dijadikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 untuk proses lebih lanjut.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001